

KATA PENGANTAR

Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat akhir Tahun Anggaran 2016 ini merupakan ukuran dari hasil pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh yang meliputi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan diantaranya Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan di Bidang Pertambangan dan Energi.

Bahan Laporan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi secara lengkap kepada Gubernur Sumatera Barat dan semua pihak sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan maupun rencana dimasa yang akan datang. Selain itu, bahan laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi mengenai kegiatan Pertambangan dan Energi di wilayah Sumatera Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas baik dari instansi terkait di Kabupaten/Kota maupun stake holder lainnya yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2016

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat

Ir. H. Herry Martinus, MM
Pembina Utama Tk I-Nip. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI*Halaman*

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB III URUSAN DESENTRALISASI	1
1. PROGRAM DAN KEGIATAN	1
2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN	
4. JUMLAH PEGWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL .	
5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	
6. PROSES PERANCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN . .	
7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN .. .	
8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	

III. BAB III URUSAN DESENTRALISASI

B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan 10 program dengan 56 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyedianan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10. Rapat-rapat dan Koordinasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah.
11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor.
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
13. Penyediaan Jasa informasi, Dokumentasi dan Publikasi.
14. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi.
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi dan Jaringan.
6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.
7. Penataan dan Pengelolaan Arsip.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penatausahaan Keuangan SKPD.
3. Perencanaan dan Penggaran SKPD.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.

1. Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
2. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai dengan Undang-undang.
3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang.
4. Peninjauan Lokasi Rencana IUP.
5. Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.
6. Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat.

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
2. Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat.
3. Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH.
4. Sosialisasi Tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal.
5. Lokakarya tentang Pembangunan Pembangkit Listrik oleh Swasta.
6. Peninjauan Lokasi Tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan.
7. Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD.
8. Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

h. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.

1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat.
2. Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg.

i. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.

1. Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat.
2. Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat.
3. Inventarisasi Pembagunan Air Tanah di Sumatera Barat.
4. Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat.
5. Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat.
6. Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah.

j. Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

1. Updating Database Sektor ESDM.
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.
3. Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat.

2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN.

Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dana APBD, berdasarkan kelompok pembagiannya adalah sebagai berikut :

APBD	PAGU	REALISASI
a. PENDAPATAN	Rp 5.680.000	Rp 5.679.360
Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.680.000	Rp 5.679.360
- Hasil Retribusi Daerah	Rp 5.680.000	Rp 5.679.360
b. BELANJA DAERAH	Rp 13.579.984.579	Rp 11.995.728.024
1. Belanja Tidak Langsung	Rp 6.981.970.589	Rp 6.814.967.467
Belanja Pegawai	Rp 6.981.970.589	Rp 6.814.967.467
2. Belanja Langsung	Rp 6.598.013.990	Rp 5.180.760.557
Belanja Barang Dan Jasa	Rp 5.991.490.990	Rp 5.015.978.557
Belanja Modal	Rp 606.523.000	Rp 164.782.000
SURPLUS/ (DEVISIT)	Rp (13.574.304.579)	Rp (11.990.048.664)

Realiasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.331.623.030		95,3	1.565.719.073	67,15
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.028.300	100	100%	17.867.700	68,65
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	297.900.000	100	100%	115.831.911	38,88
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000	100	100%	119.025.500	99,19
4	Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	80.917.200	100	100%	64.180.750	79,32
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	100	100%	40.273.400	89,5
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.996.000	100	100%	91.945.600	94,79
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	547.523.000	100	80,00%	106.180.000	19,39
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per undangan 2 an	8.000.000	100	100%	7.531.000	94,14
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	100	100%	25.895.000	86,32
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	780.000.000	100	100%	709.945.808	91,02
11	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	65.000.000	100	100%	62.365.440	95,95
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	130.000.000	100	100%	128.168.264	98,6
13	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	91.658.530	100	100%	66.358.700	72,4
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12.600.000	100	100%	10.150.000	80,56

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Output : Terlaksananya urusan surat menyurat selama 12 bulan.

Outcome : Meningkatnya urusan perkantoran dalam surat menyurat capaian fisiknya (100%). Anggarannya tidak dapat terserap dengan optimal karena sebagian pembelian prangko dan materai tidak dicairkan.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output : Terselenggaranya administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi dinas selama 12 bulan.

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi telephone, sumberdaya air dan listrik capaian fisiknya (100%). Anggrannya tidak terserap dengan optimal karena Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pindah ke gedung Wanita Rahana Kudus sehingga pembayaran Listrik pada kantor Lapai tidak dibayarkan.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Output : Terciptanya kenyamanan dalam bekerja serta terpeliharanya ruang dan halaman selama 12 bulan.

Outcome : Kenyamanan dalam bekerja serta terpeliharanya ruang dan halaman capaian fisiknya (100%).

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan.

Outcome : Terpenuhinya alat tulis kantor capaian fisiknya (100%)

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Output : Formulir dan Laporan selama 12 bulan (8 Jenis)

Output : Tersedianya blanko dan fotocopy selama 1 tahun capaian fisiknya (100%).

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Output : Tersedianya kebutuhan peralatan listrik selama 12 bulan

Output : Tercapainya kenyamanan, keindahan dan keamanan kantor capaian fisiknya (100%).

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 Jenis (Alat Lab, Kursi Rapat,Mesin Absensi, AC dan CCTV).

Output : Tercapainya kenyamanan dalam bekerja serta kemanan dokumen, capaian fisiknya (80%) hal ini terjadi karena pembelian alat laboratorium tidak di cairkan karena dalam pembahasan dengan Tim TAPD anggaran ini termasuk kedalam Penundaan Pencairan dana tahun 2016.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Output : Tersedianya surat kabar dan majalah sebanyak 2 koran, 1 majalah dan 1 buku.
Outcome : Terpenuhinya informasi mengenai peraturan dan berita lainnya capaian fisiknya (100%).
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
Output : Terselenggaranya makan dan minum rapat dalam 12 bulan.
Outcome : Terlaksananya kegiatan makan dan minum rapat dinas capaian fisiknya (100%).
10. Rapat-rapat dan Kooordinasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah.
Output : Terselenggaranya administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi dinas.
Outcome : Terkoordinasi, tersinkronisasi tugas dan kerja SKPD dengan Kabupaten, Kota dan Pusat capaian fisiknya (100%).
11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor.
Output : Tersedianya jasa supir Kantor sebanyak 2 (dua) orang.
Outcome : Kelancaran kegiatan kantor capaian fisiknya (100%).
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
Output : Tersedianya jasa pengamanan kantor 4 (empat) orang.
Outcome : Terjaganya kantor dengan aman capaian fisiknya (100%).
13. Penyediaan Jasa informasi, Dokumentasi dan Publikasi.
Output : Terlaksananya promosi potensi energi dan sumberdaya mineral Provinsi Sumatera Barat.
Outcome : Terpromosinya potensi ESDM di luar Provinsi Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

14. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

Output : Terselenggaranya Wirid/pengajian agama dan kegiatan olahraga selama 12 bulan.

Outcome : Terbinanya fisik dan mental pegawai Dinas ESDM capaian fisiknya (100%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	279.414.780		100	246.980.750	88,39
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	57.000.000	100	100%	57.000.000	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100.000.000	100	100%	90.083.850	90,08
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.498.000	100	100%	23.575.000	82,73
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	25.000.000	100	100%	17.125.000	68,5
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	2.400.000	100	100%	1.400.000	58,33
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	58.790.130	100	100%	55.996.900	95,25
7	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	7.726.650	100	100%	1.800.000	23,3

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit roda dua.

Outcome : Terlaksananya kelancaran tugas capaian fisiknya (100%).

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional sebanyak 6 unit minibus dan 1 unit kendaraan roda dua.

Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas capaian fisiknya (100%).

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output : Terlaksanaanya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.
Outcome : Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik capaian fisiknya (100%).
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi.
Output : Berfungsinya peralatan jaringan komputerisasi selama 12 bulan.
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas capaian fisiknya (100%). Anggrannya tidak terserap dengan optimal karena sebagian dana pemeliharaan jaringan internet tidak digunakan.
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi dan Jaringan.
Output : Berfungsinya peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan.
Outcome : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor capaian fisiknya (100%). Anggarannya tidak terserap dengan optimal karena Perbaikan Mesin Faximail tidak dicairkan sebab mesin tersebut masih baru.
6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.
Output : Laporan data asset SKPD selama 12 bulan.
Outcome : Terkelolanya dengan baik asset daerah capaian fisiknya (100%).
7. Penataan dan Pengelolaan Arsip.
Output : Data kearsipan dinas ESDM selama 12 bulan.
Outcome : Terkelolanya dengan baik arsip SKPD capaian fisiknya (100%). Anggrannya tidak terserap dengan optimal karena Kantor Dinas ESDM menggunakan Gedung Wanita Rohana Kudus dengan kondisi yang tidak mencukupi untuk menyediakan tempat pengelolaan arsip sehingga pembelian barang-barang untuk menyimpan arsip tidak jadi digunakan.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	48.060.000		100	48.060.000	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48.060.000	100	100%	48.060.000	100

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

Output : Tersedianya pakaian dinas 90 orang pegawai dinas ESDM.

Outcome : Meningkatnya disiplin dan keseragaman dalam berpakaian dinas capaian fisiknya (100%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	285.404.000		100	227.057.902	79,56
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	285.404.000	100	100%	227.057.902	79,56

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Output : Terikutnya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan sebanyak 52 orang.

Outcome : Meningkatnya kemampuan aparatur bidang dinas energi dan sumber daya mineral capaian fisiknya (100%).

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	226.854.520		100	195.344.350	86,11
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	32.000.000	100	100%	16.915.000	52,86
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	174.854.520	100	100%	165.535.600	94,67
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	20.000.000	100	100%	12.893.750	64,47

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Output : Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Bahan Ekspose Kepala Dinas.

Outcome : Meningkatnya sistem laporan kinerja capaian fisiknya (100%).

2. Penatausahaan Keuangan SKPD.

Output : Terlaksananya tertib administrasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD sebanyak 12 laporan.

Outcome : Terlaksananya tertip administrasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD capaian fisiknya (100%).

3. Perencanaan dan Penggaran SKPD.

Output : Tersusunnya Renstra 2016-2021, RKA, DPPA, DPA dan Bahan ekspose sebanyak 4 dokumen.

Outcome : Terlaksananya Penganggaran SKPD dengan baik capaian fisiknya (100%).

Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN	1.070.000.000		92,52	895.628.515	83,7
1	Pengawasan produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	200.000.000	100	100%	194.883.070	97,44
2	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai Dgn Undang-undang	75.000.000	100	100%	66.082.500	88,11
3	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat disekitar Tambang	75.000.000	100	100%	72.453.600	96,6
4	Peninjauan Lokasi Rencana IUP	250.000.000	100	100%	231.057.000	92,42
5	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Usaha Pertambangan Mineral	70.000.000	100	74%	51.798.000	74
6	Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	100.000.000	100	100%	99.432.250	99,43
7	Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambanagn Mineral dan Batubara	100.000.000	100	100%	82.256.595	82,26
8	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	100.000.000	100	20%	-	-
9	Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat	100.000.000	100	100%	97.665.500	97,67

1. Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.

Output : Tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Menjadi Optimalnya PNBP dektor pertambangan mineral dan batubara capaian fisiknya (100%).

2. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai dengan Undang-undang.

Output : Tersedianya penataan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sebanyak 1 dokumen capaian fisiknya (100%).

Outcome : Meningkatnya usaha pertambangan yang baik sesuai denga UU yang berlakucapaian fisiknya (100%).

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang.

Output : Tersedianya hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sebanyak 15 kali (15 IUP).

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar tambang capaian fisiknya (100%).

4. Peninjauan Lokasi Rencana IUP.

Output : Jumlah IUP yang tertinjau sebanyak 1 Laporan.

Outcome : Terlaksananya penetapan WIUP yang sesuai dengan peruntukannya capaian fisiknya (100%).

5. Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.

Output : Tersedianya dokumen penyusunan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2012 sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terlaksananya proses pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan capaian fisiknya (74%). Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara optimal karena setelah dilakukannya koordinasi dengan Direktorat Jendral Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten dan Kota perubahan Perda tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam peralihan kewenangan Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat. Maka Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba belum dapat dilaksanakan sampai dengan perubahan / pengantian UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Output : Terselenggaranya bantuan hukum terhadap kegiatan tambang rakyat yang terkait dengan masalah hukum di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terbantunya kegiatan tambang rakyat yang terkait dengan masalah hukum dan peraturan perundang-undangan di Sumatera Barat capaian fisiknya (100%) .

7. Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Output : Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebanyak 60 orang.

Outcome : Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan sektor Pertambangan capaian fisiknya (100%).

8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Output : Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara sebanyak 60 orang.

Outcome : Pengelolaan usaha pertambangan dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan capaian fisiknya (20%). Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dalam pembahasan dengan Tim TAPD anggaran ini termasuk kedalam Penundaan Pencairan dana tahun 2016.

9. Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat.

Output : Data Sebaran kegiatan tambang rakyat di Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen (15 IUP di Kab/Kota).

Outcome : Terkelolanya kegiatan tambang rakyat di Provinsi Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	798.700.000		100	603.455.708	75,55
1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	3.700.000	100	100%	3.700.000	100
2	Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat	100.000.000	100	100%	98.669.500	98,67
3	Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH	100.000.000	100	100%	97.961.000	97,96
4	Sosialisasi Tentang Sertifikat Badan Usaha di Bidang Mekahnikal dan Elektronikal	100.000.000	100	100%	43.268.600	43,27
5	Lokakarya Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik dan Swasta	100.000.000	100	100%	71.586.700	71,59
6	Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan	175.000.000	100	100%	115.403.000	65,94
7	Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD	100.000.000	100	100%	59.844.000	59,84
8	Perubahan Perda Ketenagalistrikan	120.000.000	100	100%	113.022.908	94,19

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Output : Tersedianya laporan pelaksanaan sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro tidak dapat dibangun disebabkan karena pada daerah (jorong) yang akan dibangun PLTMH tersebut telah terlistriki oleh PT. PLN (persero) pada bulan desember 2015.

2. Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat.

Output : Terdatanya kondisi PLTS yang sudah dibangun sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Diketahuinya perkembangan dan permasalahan PLTS capaian fisiknya (100%).

3. Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH.

Output : Terbinanya pengelolaan listrik pedesaan 1 dokumen (7 Kabupaten)

Outcome : Agar PLTMH yang dibangun dapat terkelola dengan baik dan dengan tarif yang memadai capaian fisiknya (100%).

4. Sosialisasi Tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal.

Output : Tersosialisasinya tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal sebanyak 60 orang.

Outcome : Pelaku usaha (jasa penunjang) memahami tentang peraturan di Bidang Usaha capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi tidak digunakan dan Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat digunakan karena kegiatan Sosialisasi ini dinilai oleh Inspektorat Provinsi tidak memerlukan koordinasi ke Kab/Kota.

5. Lokakarya tentang Pembangunan Pembangkit Listrik oleh Swasta.

Output : Terlaksananya lokakarya tentang pembangunan pembangkit listrik oleh swasta sebanyak 50 orang.

Outcome : Diketahuinya permasalahan pembangunan pembangkit listrik dan swasta capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat digunakan karena kegiatan Sosialisasi ini dinilai oleh Inspektorat Provinsi tidak memerlukan koordinasi ke Kab/Kota.

6. Peninjauan Lokasi Tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan.

Output : Terlaksananya peninjauan lokasi permohonan perizinan ketenagalistrikan sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Diketahuinya lokasi serta data ketenagalistrikan yang diajukan permohonan izin capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena penambahan dana sebesar Rp. 50.000.000,- karena dalam pembahasan dengan Tim TAPD anggaran ini

termasuk kedalam Penundaan Pencairan dana tahun 2016.

7. Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD.

Output : Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD/Genset sebanyak 100 orang.

Outcome : Tersosialisasinya SLO untuk PLTMH dan PLTD capaian fisiknya (100%). Anggaran tidak terserap secara optimal karena Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat digunakan karena kegiatan Sosialisasi ini dinilai oleh Inspektorat Provinsi tidak memerlukan koordinasi ke Kab/Kota.

8. Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

Output : Terlaksananya Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

Outcome : Untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang ketenagalistrikan capaian fisiknya (100%).

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
8	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN ENERGI	260.000.000		100	243.593.689	93,69
1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat	125.000.000	100	100%	115.932.189	92,75
2	Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat	80.000.000	100	100%	74.909.500	93,64
3	Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg	55.000.000	100	100%	52.752.000	95,91

1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat.

Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan sektor ketenagalistrikan dan migas sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Tersedianya data pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas capaian fisiknya (100%).

2. Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat.

Output : Terdatanya potensi biogas di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Tersedianya data potensi biogas di Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

3. Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg.

Output : Terlaksananya kegiatan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Diketahuinya data hasil pelaksanaan konversi minyak tanah ke pengguna LPG 3 Kg capaian fisiknya (100%).

Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
9	PROGRAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR TANAH	900.000.000		100	834.096.070	92,68
1	Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) Sumatera Barat	150.000.000	100	100%	129.947.500	86,63
2	Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat	100.000.000	100	100%	96.782.760	96,78
3	Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat	150.000.000	100	100%	147.638.000	98,43
4	Penelitian Zona Air Tanah Sumatera Barat	150.000.000	100	100%	127.488.860	84,99
5	Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat	150.000.000	100	100%	145.132.000	96,75
6	Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah	200.000.000	100	100%	187.106.950	93,55

1. Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat.

Output : Terwujudnya zona konservasi cekungan air tanah di Bukittinggi dan Solok sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terkendalinya pemakaian air tanah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku capaian fisiknya (100%).

2. Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat.

Output : Tersedianya database dan informasi hidrogeologi di Kabupaten Pasaman sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku capaian fisiknya (100%).

3. Inventarisasi Pembangunan Air Tanah di Sumatera Barat.

Output : Tersedianya database penggunaan air tanah di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku capaian fisiknya (100%).

4. Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat.

Output : Tersedianya Peta Zonasi Air Tanah pada CAT di Kota Padang-Padang Pariaman sebanyak 1 dokumen dan peta.

Outcome : Terwujudnya konservasi air tanah pada CAT Kota Padang – Padang Pariaman capaian fisiknya (100%).

5. Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat.

Output : Terlaksananya penyelidikan eksplorasi air tanah dengan metoda geolistrik di Sumatera Barat sebanyak 2 dokumen dan peta.

Outcome : Meningkatnya penyediaan air bersih bagi daerah sulit air capaian fisiknya (100%).

6. Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah.

Output : Terlaksananya penyusunan Ranperda Air Tanah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terlaksananya proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan capaian fisiknya (100%).

Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

NO	KEGIATAN	JUMLAH		REALISASI		
		Dana (Rp)	Bobot (%)	Fisik %	Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
10	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	397.957.660		100	320.824.500	80,62
1	Updating Database Sektor ESDM	66.524.000	100	100%	61.600.500	92,6
2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	180.000.000	100	100%	132.560.000	73,64
3	Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	61.433.660	100	100%	42.887.000	69,81
4	Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat	90.000.000	100	100%	83.777.000	93,09

1. Updating Database Sektor ESDM.

Output : Tersusunnya dan terkonsolidasinya database sektor ESDM sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dengan dokumen perencanaan capaian fisiknya (100%).

2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.

Output : Terpantau Program kegiatan DESDM sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dengan dokumen perencanaan capaian fisiknya (100%).

3. Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Output : Terlaksananya pengembangan peralatan dan Website DESDM, pembuatan dokumen statistik dan penyebarluasan Informasi DESDM sebanyak 3 dokumen.

Outcome : Tersedianya data sumberdaya alam di Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

4.Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat.

Output : Terlaksananya evaluasi kejadian bencana geologi di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

Outcome : Terwujudnya saran tindak (rekomendasi) penggulangan bencana geologi Sumatera Barat capaian fisiknya (100%).

3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta tugas Pembantuan sesuai PERDA No. 4 Tahun 2008.

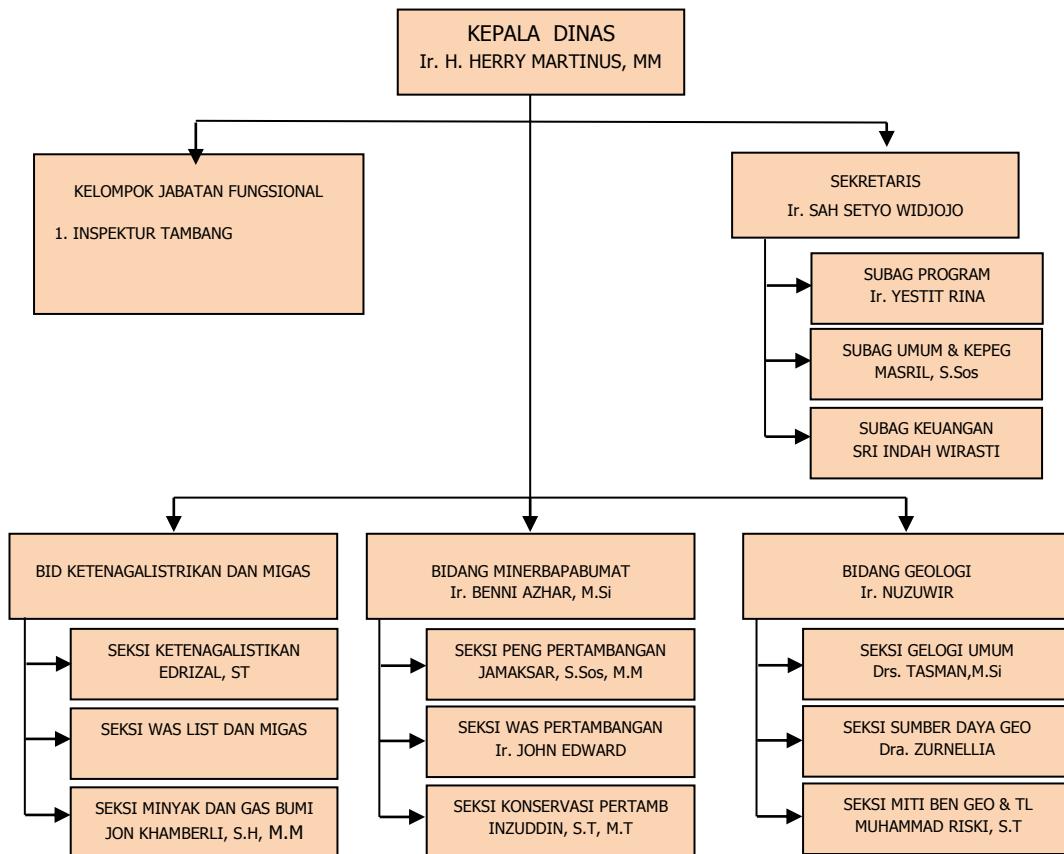
Didalam menjalankan tugas kerja, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, geologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Barat terdiri dari:



4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.

Jumlah Pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebanyak 90 orang. Kualifikasi pendidikan pegawai berdasarkan pendidikan, Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	NIP	PANGKAT
				Gol/Ruang
1	2		3	4
1	Ir. Herry Martinus, MM	S2. Magister Manajement	19650310 199303 1 004	Pembina Tk. I, IV/b
2	Ir. SAH. Setyo Widjojo	Sarjana Teknik Geologi	19581025 198703 1 004	Pembina Tk. I, IV/b
3	Ir. Benni Azhar,M.Si	S2. Ekonomi Pembangunan	19590826 199202 1 001	Pembina Tk. I, IV/b
4	Ir. Nuzuwir	Sarjana Teknik geologi	19611214 199003 1 004	Pembina Tk. I, IV/b
5	Drs. Tasman, M.Si	S2 Ilmu Lingkungan	19601231 198203 1 134	Pembina, IV/a
6	Jon Khamberli, SH. MM	S2 Magester Manajemen	19610908 198303 1 007	Pembina, IV/a
7	Jamaksar, S.Sos, MM	S2 Magister Manajemen	19630901 198403 1 003	Pembina, IV/a
8	E d r i z a l , ST ,MM	S2 Magister Manajemen	19610617 198403 1 003	Pembina, IV/a
9	Muhammad Riski, ST. MM	S2 Manajemen Ekonomi	19660606 199803 1 007	Penmbina, IV/a
10	Masril, S. Sos, MM	S2 Magister Manajemen	19621231 199203 1 065	Penmbina, IV/a
11	Marhariandi Suib,ST , MM	S2 Magester Manajemen	19691207 199103 1 003	Penmbina, IV/a
12	Dra. Erlinda	Sarjana Adm. Negara	19610710 199103 2 002	Penata Tk. I, III/d
13	Dra. Zurnellia	Sarjana Kimia	19610120 199111 2 001	Penata Tk. I, III/d
14	Ir. John Edward	Sarjana Teknik Pertambangan	19630416 199308 1 001	Penata Tk. I, III/d
15	Ir. Yestit Rina	Sarjana Manag. Informatika	19690826 199403 2 002	Penata Tk. I, III/d
16	A. Kadir, SE	Sarjana Ekonomi	19601125 198303 1 010	Penata Tk. I, III/d
17	Penta Wisnu, BE, ST	Sarjana Teknik Mineral	19600125 199003 1 003	Penata Tk. I, III/d
18	Johny Ivan, ST	Sarjana Teknik Elektro	19630828 199503 1 001	Penata Tk. I, III/d
19	Sri Indah Wirasti, Amd	Sarmud Sekretaris	19631021 198803 2 001	Penata Tk. I, III/d
20	Mitro Wardoyo, SE	Sarjana Akuntansi	19710520 199103 1 003	Penata Tk. I, III/d
21	Erick Kurniawan, ST. MT	S2 Teknik Elektro	19760227 200501 1 006	Penata Tk. I, III/d
22	Inzuddin, ST . MT	S2 Teknik Geologi	19690313 199210 1 001	Penata Tk. I, III/d
23	Abdi Rasul, S.Sos. Msi	S2. Ilmu Pemerintahan	19700711 199303 1 004	Penata Tk. I, III/d
24	Eva Joni, S.Sos	Sarjana Adm. Negara	19701016 199203 1 004	Penata Tk. I, III/d
25	Amrilsyah, ST	Sarjana Teknik Industri	19670401 199003 1 010	Penata Tk. I, III/d
26	Jamaris, SE . MSi	S2 Megister Sains	19690612 199703 1 004	Penata Tk. I, III/d
27	Sepikartomi, S.Sos. MM	S2 Magester Manajemen	19700927 199203 1 003	Penata Tk. I, III/d
28	Ardi Junaidi, S.Sos. Msi	S2. Ilmu Pemerintahan	19700607 199203 1 004	Penata Tk. I, III/d

29	Syafriadi, S.Sos	Sarjana Adm. Negara	19600626 198903 1 002	Penata Tk. I, III/d
30	Tisnohari, BE	Sarmud Teknik Geologi	19590121 198303 1 010	Penata, III/c
31	Sandikala Bahtaruddin	Sarmud Teknik Mesin	19641124 199103 1 003	Penata, III/c
32	Ibnu Ishaq, ST.MSi	Sarjana Teknik Elektro	19690408 199203 1 005	Penata, III/c
33	Agus Sugianto,ST	Sarjana Teknik Elektro	19720823 199203 1 002	Penata, III/c
34	Azril. A , ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19691221 199103 1 007	Penata, III/c
35	Hj. Haida Reno Mutia, ST. MM	S2 Manajemen Sumber Daya	19680821 199303 2 003	Penata, III/c
36	Admizal Nazki, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19690304 200604 1 001	Penata, III/c
37	Milona Ilza Sakantira, ST. M.Eng	S2 Magister Geologi Pertambangan	19731004 200604 2 003	Penata, III/c
38	Andoni Erizon, ST	Sarjana Teknik Geodesi	19751023 200604 1 004	Penata, III/c
39	Dian Hadiyansyah, ST. MT	S2 Teknik Geologi	19810608 200604 1 005	Penata, III/c
40	Afrizal N, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19661026 199003 1 003	Penata, III/c
41	N u r i j a l , S. Sos	Sarjana Administrasi Negara	19740131 199303 1 001	Penata, III/c
42	Nofriyenti, S. Sos	Sarjana Administrasi Negara	19691020 199203 2 005	Penata, III/c
43	Maisarah , SE	Sarjana Ekonomi	19720529 199303 1 004	Penata, III/c
44	Yusnidar	SMEA	19601205 198403 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b
45	Sri Erwinta	SMEA	19620725 198403 2 004	Penata Muda Tk. I, III/b
46	R e n i w a t i	SMEA	19630821 198403 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b
47	Lastini Mulya	SMA	19590917 198403 2 004	Penata Muda Tk. I, III/b
48	N u r l a i l i	SMA	19621201 198403 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b
49	Rosman	STM	19640119 198603 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b
50	Musalmi	SMEA	19641129 199003 2 004	Penata Muda Tk. I, III/b
51	Rahmayanti	SMEA	19681012 199103 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b
52	Harun Suhar	KPAA	19650907 198403 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b
53	Eri Efendi	SMA	19640424 199103 1 007	Penata Muda Tk. I, III/b
54	Suhasnimar	SMA	19680306 199103 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b
55	Gustina	SMA	19610408 199203 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b
56	Pangolasan Matondang	STM	19691010 199303 1 006	Penata Muda Tk. I, III/b
57	Syafrizal. A	STM	19730910 199303 1 003	Penata Muda TK. I, III/b
58	Farida	SMA	19700831 199307 2 001	Penata Muda TK. I, III/b
59	Z u l f a, S. Sos	Sarjana Administrasi Negara	19660101 199603 2 002	Penata Muda TK. I, III/b
60	Ernawati	SMA	19661206 199403 2 006	Penata Muda TK. I, III/b
61	Beni Wahyudi, ST. ME	S2 Magister Perencanaan dan	19830330 200902 1 001	Penata Muda TK. I, III/b
		Kebijakan Publik		
62	Kurnianto,ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19820530 201001 1 015	Penata Muda TK. I, III/b
63	Mawad Datun, ST	Sarjana Teknik Elektro	19840320 201001 1 020	Penata Muda TK. I, III/b

64	Rusnoviandi, ST.MM	S2 Magister Manajemen	19811111 201101 1 001	Penata Muda TK. I, III/b
65	Y a h y a	SMA	19640301 198903 1 004	Penata Muda TK. I, III/b
66	Frans Boy Martua Dimpos S ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19790210 201101 1 001	Penata Muda TK. I, III/b
67	Defri Kurniawan, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19820208 201101 1 001	Penata Muda TK. I, III/b
68	Arie Meland Perdana, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19851024 201101 1 005	Penata Muda, III/a
69	Edia Mitra	SMA	19681215 199203 2 008	Penata Muda, III/a
70	Fernande Finus, SE	Sarjana Akuntansi	19860602 200802 2 001	Penata Muda, III/a
71	Oenggoel Prapito Kencono, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19830124 201403 1 001	Penata Muda, III/a
72	Ardison, ST	Sarjana Teknik Perminyakan	19851021 201403 1 001	Penata Muda, III/a
73	Desrita Pardi, ST	Sarjana Teknik Elektro	19861219 201403 2 001	Penata Muda, III/a
74	Nur Afni, ST	Sarjana Teknik Elektro	19830911 201502 2 001	Penata Muda, III/a
75	Muhammad Giotta, ST	Sarjana Teknik Elektro	19840301 201502 1 002	Penata Muda, III/a
76	Riki Vernando, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19850128 201502 1 001	Penata Muda, III/a
77	Afrina Wulan Munir, ST	Sarjana Teknik Pertambangan	19910428 201502 2 003	Penata Muda, III/a
78	Yuskal	SMA IPS	19670810 199103 1 007	Penata Muda, III/a
79	Novista Kartika Sari, Amd	Sarmud Akuntansi	19871114 201101 1 004	Pengatur TK.I - II/d
80	Mawir	KPA	19590525 198503 1 009	Pengatur, II/c
81	Riski Nosarolan, A. Md	Akuntansi	19871117 201502 1 003	Pengatur, II/c
82	Mursit Mursito	SMA	19670426 200701 1 003	Pengatur, II/c
83	Junaidi	SMA	19700627 200701 1 006	Pengatur, II/c
84	Hendra Bukti	STM	19720609 200701 1 005	Pengatur, II/c
85	Evi Yusmaneli	SMEA	19721116 200801 2 002	Pengatur, II/c
86	Nasiran	SMA	19690206 200901 1 004	Pengatur Muda TK. I - II/b
87	Ismanto	SMA	19801020 200901 1 006	Pengatur Muda TK. I - II/b
88	Verri	Paket C	19700504 200701 1 005	Pengatur Muda TK. I - II/b
89	Dasril	Paket B	19730421 200701 1 005	Juru - I/c
90	Alfian	SD	19770301 200901 1 007	Juru Muda Tk. I, I/b

Tabel Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4
1	Ir. Herry Martinus, MM	Kepala Dinas	
2	Ir. SAH. Setyo Widjojo	Sekretaris	
3	Ir. Benni Azhar,M.Si	Kabid Minerbabumat	
4	Ir. Nuzuwir	Kabid Geologi	
5	Drs. Tasman, M.Si	Kasi Geologi Umum	
6	Jon Khamberli, SH. MM	Kasi Minyak dan Gas Bumi	
7	Jamaksar, S.Sos, MM	Kasi Pengusahaan Pertambangan	
8	E d r i z a l, ST ,MM	Kasi Ketenagalistrikan	
9	Muhammad Riski, ST. MM	Kasi Mitigasi Bencana Geol. Tata Lingk.	
10	Masril, S. Sos, MM	Kasubag Umum & Kepegawaian	
13	Dra. Zurnellia	Kasi SDA Geologi	
14	Ir. John Edward	Kasi Pengawasan Pertambangan	
15	Ir. Yestit Rina	Kasubag Program	
16	Sri Indah Wirasti, Amd	Kasubag Keuangan	
17	Inzuddin, ST . MT	Kasi Konservasi Pertambangan	
18	Amrilsyah, ST	Penyelidik Bumi Pertama	Penyelidik Bumi Pertama
19	Azril. A , ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
20	Admizal Nazki, ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
21	Afrizal N, ST	Penyelidik Bumi Pertama	Penyelidik Bumi Pertama
22	Kurnianto,ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
23	Rusnoviandi, ST.MM	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
24	Frans Boy Martua Dimpos S ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
23	Defri Kurniawan, ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
25	Arie Meland Perdana, ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama
26	Oenggoel Prapito Kencono, ST	Inspektur Tambang Pertama	Inspektur Tambang Pertama

5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.

APBD	PAGU	REALISASI
a. PENDAPATAN	Rp 5.680.000	Rp 5.679.360
Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.680.000	Rp 5.679.360
- Hasil Retribusi Daerah	Rp 5.680.000	Rp 5.679.360
b. BELANJA DAERAH	Rp 13.579.984.579	Rp 11.995.728.024
1. Belanja Tidak Langsung	Rp 6.981.970.589	Rp 6.814.967.467
Belanja Pegawai	Rp 6.981.970.589	Rp 6.814.967.467
2. Belanja Langsung	Rp 6.598.013.990	Rp 5.180.760.557
Belanja Barang Dan Jasa	Rp 5.991.490.990	Rp 5.015.978.557
Belanja Modal	Rp 606.523.000	Rp 164.782.000
SURPLUS/ (DEVISIT)	Rp (13.574.304.579)	Rp (11.990.048.664)

6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasian kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja pembangunan daerah selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah RPJP daerah dan PRJMD ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat di dalam pembuatan perencanaan tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat paling bawah

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat mengikuti Musrenbang di Tingkat Provinsi. Musrenbang tersebut merupakan hasil dari Musrenbang desa, kecamatan dan Kabupaten. Setelah melakukan Musrenbang Provinsi dilakukan Musrenbang Tingkat Nasional. Selanjutnya setelah melalui tahapan agenda selanjutnya usulan untuk proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta DPR dan DPRD ditetapkan sebagai Peraturan Perundang-undangan.

7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun 2016 adalah :

Kondisi Sarana dan Prasarana

Gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Prov. Sumatera Barat

No	Sarana dan Prasarana	Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	Gedung Kantor di Jl. Jhoni Anwar No. 85 Padang dengan luas lebih kurang 1.054 M ² .	-	Kondisi Rusak akibat gempa 30 September 2009. Sedang dalam proses kontruksi.	-
2	Sarana perkantoran utama yang digunakan secara rutin diantaranya adalah komputer desktop dan laptop.	-	Kurang	-
3	Sarana Angkutan, Sarana angkutan yang digunakan terdiri dari sepeda motor (kendaraan roda dua) 9 unit, Minibus 5 unit dan Double cubin 1 unit.	-	-	Cukup, 4 unit motor digunakan untuk operasional kegiatan.
4	Peralatan lapangan yang digunakan untuk kegiatan survey dan pemetaan geologi.	-	Kurang	-
5	Laboratorium, sarana laboratorium yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral digunakan untuk melakukan analisa mineral dan kualitas air.	-	Kondisi rusak akibat gempa 30 September 2009	-

8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

• Permasalahan.

❖ Bidang Sekretariat

- Akibat gempa yang terjadi pada bulan September 2009 lebih kurang 70% bangunan gedung kantor mengalami kerusakan yang serius dan tidak layak untuk dipakai, untuk sementara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berkantor pada gedung Wanita Rohana Kudus sampai dengan Gedung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di jalan Jhoni Anwar No. 85 selesai dibangun.
- Sebagai dinas teknis yang diberi tugas untuk mengelola sektor energi dan sumber daya mineral sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, sebagai gambaran jumlah tenaga teknis yang tersedia sebagai berikut :
 - i. Stata 2 (S2) geologi sebanyak 1 orang
 - ii. Strata 2 (S2) Lingkungan sebanyak 1 orang
 - iii. Strata 1 (S1) Pertambangan sebanyak 11 orang
 - iv. Strata 1 (S1) Geologi sebanyak 2orang
 - v. Strata 1 (S1) Elektro sebanyak 5 orang
 - vi. Strata 1 (S1) Geodesi sebanyak 1 orang
 - vii. Strata 1 (S1) Perminyakan sebanyak 1 orang

Dengan jumlah tenaga teknis tersebut diatas dikaitkan dengan rentang tugas yang cukup luas terasa kekurangan sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kurang maksimal, ditambah lagi dengan beberapa orang tenaga teknis memasuki masa pensiun.

❖ Bidang Minerba

Belum adanya kejelasan pengalihan Inspektur Tambang sebagaimana yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana kewenangan pengelolaan Inspektur Tambang di alihkan ke Pemerintah Pusat. Namun, sampai saat ini kementerian ESDM belum lagi menganggarkan biaya operasional Inspektur Tambang untuk

dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, sementara Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tidak diperbolehkan untuk menggarkan pada Tahun 2016 karena bukan kewenangan Pemerintah Provinsi.

❖ Bidang Energi

Gagalnya pembangunan Pemebangkit Listrik Tenaga Mikrohidro disebabkan karena pada daerah (jorong) yang akan dibangun PLTMH tersebut telah terlistriki pada bulan desember 2015, padahal pada saat pembuatan FS / DED jorong tersebut belum terlistriki oleh PLN.

❖ Bidang Geologi

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang sebelumnya menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Seiring dengan perpindahan kewenangan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan penerbitan izin pengusahaan air tanah, antara lain :

1. Sebagian besar pemohon perpanjangan izin pengusahaan air tanah sudah habis masa berlakunya, sedangkan pajak pengambilan air tanah masih dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Banyak pengguna air tanah baik berupa sumur bor ataupun sumur gali yang awalnya tidak untuk keperluan usaha/komersil, berkeinginan untuk mengurus SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah) dengan tujuan komersil/usaha.
3. Pemohon mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan teknis, sehingga proses penerbitan izin tidak bisa dilakukan.
4. Beberapa hal yang menyebabkan pengguna air tanah untuk tujuan komersil tidak mengurus izin pengusahaan air tanah adalah :
 - Tidak mengetahui sebelumnya peraturan pengusahaan air tanah yang berlaku.

- Pembayaran pajak penggunaan air tanah kepada pemerintah Kabupaten/Kota sudah dianggap sebagai izin pengusahaan air tanah.
 - Sumur Bor atau Sumur Gali yang sekarang digunakan untuk komersil adalah bekas Sumur Bor atau Sumur Gali yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
 - Kesulitan dalam melengkapi persyaratan teknis dalam pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIP/SIPA).
5. Kesulitan pemohon dalam memenuhi persyaratan teknis pada proses perpanjangan izin pengusahaan air tanah antara lain disebabkan oleh :
- Tidak mengetahui sebelumnya peraturan pengusahaan air tanah yang berlaku.
 - Penerbitan izin sebelumnya tidak memakai dasar hukum yang sama dengan penerbitan izin saat ini.
 - Penerbitan izin sebelumnya tidak mengikuti secara utuh dasar hukum yang berlaku.
 - Belum adanya regulasi ataupun kebijakan untuk mengatasi persoalan poin 1, 2 dan 3 sementara jumlah yang memasukkan permohonan izin pengusahaan air tanah semakin banyak.

- **Solusi**

- ❖ Bidang Sekretariat
 - Untuk sarana perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral direncanakan rampung pada tahun 2018.
 - Dari segi ketersediaan sumber daya aparatur perlu penambahan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, masih kurang untuk S1 Pertambangan 4 orang, S1 Geologi 3 orang, S1 elektro 2 orang, D3 Geologi 3 orang dan S1 Perminyakan 1 orang.

❖ Bidang Minerba

Melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan BAKN sebagai lembaga yang akan menindak lanjuti pengelihan ASN (Inspektor Tambang). Untuk tahun 2017 mendorong pemerintah pusat dapat mengalokasikan dan menggarkan biaya operasional Inspektor Tambang, sehingga peninjauan dan pengendalian tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang.

❖ Bidang Energi

Solusi dari kegagalan kegiatan Pembangunan PLTMH tersebut, kedepannya untuk pembangunan PLTMH di suatu Jorong terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. PLN (persero) wilayah Sumbar tentang Rencana pengembangan jaringan di daerah jorong yang akan dibangun.

❖ Bidang Geologi

- Diperlukan komitmen bersama antara instansi terkait untuk penertiban izin-izin lama dan penerbitan izin baru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Diperlukan suatu aturan atau kebijakan dari Pimpinan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam proses penerbitan izin pengusahaan air tanah khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon, sehingga permohonan izin-izin yang masuk dapat diakomodir tetapi tidak melanggar peraturan yang berlaku serta pajak yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota resmi untuk dipungut.
- Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan pengusahaan air tanah kepada masyarakat pada umumnya dan pengguna air tanah untuk komersil pada khususnya.
- Menyurati dan melakukan konsultasi ke Badan Geologi Cq. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan di Bandung.